

BAB III

SEJARAH DAN DINAMIKA KONFLIK THAILAND SELATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MALAYSIA

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai dinamika politik Thailand dan Thailand Selatan serta sejarah dan dinamika konflik Thailand Selatan. Selain itu, bab ini akan membahas mengenai dampak dari konflik Thailand Selatan terhadap Malaysia.

A. Dinamika Politik Thailand

Gambar 3.1. Peta Thailand



Sumber: *Thailand Map* dalam <https://www.thinglink.com/scene/721777891322363905>.

Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah merasakan adanya kolonialisasi Barat seperti negara-negara di Asia Tenggara yang lain¹. Thailand beribukotakan di Bangkok, memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja sebagai pelindung ajaran Buddhisme Thailand dan lambang jati diri persatuan bangsa. Kepala pemerintahannya adalah perdana menteri yang diambil dari parlemen dan biasanya merupakan pemimpin partai mayoritas yang ada di Thailand. Parlemen di Thailand sendiri menggunakan sistem Dua Kamar yang disebut Majelis Nasional yang kemudian dibagi menjadi Dewan Perwakilan dengan masa jabatan 4 tahun dan Senat dengan masa jabatan 6 tahun².

Jatuhnya kerajaan Ayutthaya dan berdirinya kerajaan Siam yang menyebabkan Militer dan sipil menjadi terpisah. Perubahan sistem pemerintahan yang semula desentralisasi menjadi sentralisasi setelah berlakunya Undang-undang *Thesaphiban* pada tahun 1897. Pada tahun 1932 terjadi sebuah kudeta tidak berdarah yang dilakukan oleh pihak militer. Pihak militer menuntut perubahan sistem monarki absolut menjadi monarki yang berdasarkan konstitusi. Raja Prajadhipok menyetujui penghapusan monarki absolut dan memberlakukan sistem pemerintahan berlandaskan konstitusi. Sebelum Revolusi 1932, kerajaan tidak memiliki konstitusi tertulis. Setelah

¹ Shafira, Pinky. 2014. *Kondisi Ekonomi, Politik Sosial Thailand*.http://pshafira-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-99662-MBP%20Asia%20Tenggara-Kondisi%20Ekonomi.%20Politik.%20Sosial%20Thailand.html. Diakses pada tanggal 09 April 2017. Pukul 11.27 WIB.

² Octaviano, Arya. 2015. *Makalah Sistem Pemerintahan Thailand*.https://www.academia.edu/15829488/MAKALAH_PEMERINTAHAN_THAILAND. Sekolah Tinggi Ilmu dan Sosial: Tangerang. Diakses pada tanggal 07 April 2017.

adanya revolusi tersebut mengubah pergeseran rezim Thailand yaitu dari rezim monarki menjadi rezim militer³.

Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer tersebut mempengaruhi para elit politik negara tersebut dan sejak itu pula pihak militer mengambil kontrol atas kekuasaan negara selama 60 tahun. Hal ini kemudian yang menjadi jurang antara demokrasi dan militer, yang mana sejak paska kudeta pertama tahun 1932 Thailand mengalami siklus perubahan pemerintahan dimulai dengan kudeta, pemilu, periode singkat pemerintahan sipil, serta krisis politik. Revolusi tahun 1932 berlangsung dengan lancar dan berhasil memaksa raja menerima konstitusi yang diajukan oleh Partai Rakyat (Partai Pridi Banomyong dan kawan-kawannya). Pada tahun 1947 Thailand kembali mengalami kudeta, yang mana kudeta ini dilaksanakan dengan tujuan agar para petinggi militer mendapatkan jabatan senior di pemerintahan. Hingga pada tahun 1977 isu demokratisasi pun akhirnya pecah dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, serta kebebasan politik. Kudeta di tahun ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer. Salah satu masalah demokratisasi di Thailand adalah karena lemahnya periode dominasi birokratik dan militer, maka rezim demokratik terkadang sulit menegakkan legitimasi yang berkaitan dengan kultur politik tradisional. Intervensi militer tahun 1991 merefleksikan

³Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 107.

ketidaksukaan angkatan bersenjata terhadap berkembangnya pengaruh partai politik dan masyarakat sipil yang mencoba untuk lebih menguasai militer⁴.

Pada tahun 2006 kembali terjadi kudeta militer di Thailand, pada saat itu militer membubarkan pemerintahan yang dipimpin oleh Thaksin Sinawatra dan mencabut konstitusi tahun 1997. Thaksin Shinawatra yang pada saat itu berada di New York mendeklarasikan keadaan darurat di Bangkok. Pada tahun 2014 kudeta militer kembali terjadi, kepala militer Thailand yang pada masa itu dijabat oleh Prayuth Chan-ocha mendeklarasikan kudeta militer setelah berbulan-bulan Thailand dipenuhi oleh ketidak pastian politik. Jenderal Prayuth Chan-ocha pun mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri sementara Thailand⁵.

Sejak militer berkuasa di Thailand, konsepsi keamanan nasional merupakan salah satu produk dari rezim militer yang berkuasa. Gerakan komunis di Thailand memperkuat argumentasi militer tentang pentingnya konsepsi keamanan yang mengutamakan stabilitas dan integritas wilayah nasional. Kemajuan komunisme paska terbentuknya Cina dibawah komunis merupakan alasan bagi rezim militer untuk menjalankan kebijakan politik represif. Hingga pada tahun 1988 ketika Thailand menjadi pemerintahan

⁴ Anggraini Devi. 2014. *Kondisi Politik, Ekonomi dan sosial Thailand Baik Domestik maupun Internasional*. http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-97760-MBP%20ASIA%20TENGGA-KONDISI%20POLITIK,%20EKONOMI,%20SOSIAL%20THAILAND%20BAIK%20DOMESTIK%20MAUPUN%20INTERNASIONAL.html. Diakses pada tanggal 09 April 2017. Pukul 11.18 WIB.

⁵Okezone.com. 2014. *Melihat Sejarah Kudeta Militer Thailand*. <http://news.okezone.com/read/2014/05/23/414/989353/melihat-sejarah-kudeta-militer-thailand>. Diakses pada tanggal 09 April 2017. Pukul 12.09 WIB.

perlementer di bawah PM Prem Tinsulanond mengakhiri dominasi politik militer dalam sistem politik, pemerintahan sipil baru menerapkan berbagai kebijakan yang mengarah pada profesionalisme militer Thailand. Tidak berlangsung lama ketika tahun 1991 kudeta oleh militer kembali terulang dan merebut kembali dominasi militer dalam perpolitikan Thailand. Tetapi dengan meningkatnya supremasi sipil yang banyak didukung para perwira ini dengan sendirinya mengubah konsepsi dasar keamanan nasional Thailand yang mencakup isu-isu non-militer seperti pembangunan ekonomi, persamaan hak, kebebasan, keadilan, reformasi politik, desentralisasi birokrasi, HAM, serta lingkungan hidup. Konsepsi keamanan ini kemudian tercantum dalam buku putih pemerintah yakni dalam *The Defense of Thailand 1994*.⁶

Memang pada dasarnya kondisi politik internal Thailand mudah sekali terjadi pergolakan terhadap pemerintahan, dimana porsi militer dalam kedudukan pemerintah begitu besar. Kendati demikian kondisi labil ini tidak hanya ditunjukkan dalam ranah domestik saja, namun ranah regional pun Thailand mengalami kerentanan masalah politik. Konflik perbatasan seringkali mewarnai dinamika hubungan antarnegara dan ini pula yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara memperebutkan suatu wilayah yakni Gunung Dangrek, dimana didalamnya terdapat kuil yang bernama Preah Vihear. Baik Thailand ataupun Kamboja mengklaim wilayah Kuil Preah Vihear tersebut sebagai bagian dari teritori mereka. Klaim Thailand

⁶Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 108-112.

berdasarkan peta yang dibuat tahun 1904 oleh kesepakatan kolonial Perancis dengan Siam yang menempatkan Kuil Preah Vihear berada pada sisi Thailand, sedangkan Kamboja menggunakan peta tahun 1907 yang dibuat oleh Perancis. Pada Juli 2008, ketegangan antara Kamboja dan Thailand mulai memanas ketika kuil Preah Vihear ditetapkan sebagai warisan dunia Kamboja oleh UNESCO.⁷

Selain kudeta militer dan perebutan candi maupun wilayah dengan negara tetangganya, terdapat kasus pemberontakan di wilayah Selatan Thailand. Pemberontakan ini sendiri menjadi masalah domestik Thailand yang sampai saat ini belum terselesaikan.⁸Kasus seperti pengeboman, penembakan, pembakaran sekolah, dan penculikan, diantaranya bisa dikatakan terjadi hampir setiap hari. Kasus yang terjadi di Thailand Selatan yang selalu di beritakan ini terjadi paling banyak di provinsi Narathiwat, Pattani dan Yala. Dan beberapa kekerasan juga terjadi di beberapa distrik di Songkhla, yang juga didominasi oleh etnis muslim Melayu di beberapa distrik tersebut, juga di Hat Yai yang merupakan daerah penghubung sekaligus kota terbesar di Thailand Selatan. Sampai sekarang konflik Thailand Selatan telah menewaskan lebih dari 6.500 orang⁹.

⁷Oktria, Okki Ayu. 2013. *Kebijakan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 2(4) hal. 1-22

⁸Kompas.com, 2017. *Usai Raja Teken Konstitusi Baru, Thailand Selatan Dilanda 23 Serangan*. <http://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/13160201/usai.raja.teken.konstitusi.baru.thailand.selatan.dilanda.23.serangan>. Diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 00.39 WIB.

⁹*Ibid.*

B. Dinamika Politik Thailand Selatan

Gambar 3.2. Peta Thailand Selatan – Malaysia Utara



Sumber: *Gender and Migration in Muslim Communities in Thailand's Southern Border Region* dalam <https://kyotoreview.org/issue-7/gendered-crossings-gender-and-migration-in-muslim-communities-in-thailands-southern-border-region/>.

Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan secara langsung dengan Semenanjung Malaya. Thailand Selatan Selatan meliputi 5 provinsi paling selatan dari wilayah Thailand yang terdiri dari provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla. Luas wilayah Thailand Selatan sekitar 21.021 Km². Jumlah penduduk di wilayah ini sekitar 3,6 juta jiwa¹⁰.

¹⁰Worldometers.info. 2016, Thailand Population. <http://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 14.52 WIB.

Situasi politik di Thailand Selatan hampir tidak pernah stabil. Situasi politik di Thailand Selatan semenjak diberlakukannya sistem *Thesaphiban* (Undang-undang Administrasi Daerah) yang diperkenalkan tahun 1897 dan diprakarsai oleh raja Chulangkron. *Thesaphiban* merupakan upaya mereformasi kebijakan desentralisasi administrasi menjadi sentralisasi administrasi atau sistem pemerintahan terpusat. Kebijakan mengubah birokrasi tradisional ke dalam birokrasi Thailand, sistem ini meliputi semua kelompok lokal dalam administrasi dan birokrasi kerajaan¹¹. Pejabat-pejabat lokal di Thailand Selatan digantikan oleh gubernur (*Khaluang Thesaphiban*) yang ditunjuk langsung oleh raja Siam di Bangkok, agar kontrol terhadap daerah Thailand Selatan semakin kuat dan ketat. Peraturan ini dinilai efektif mengontrol daerah Thailand Selatan yang secara geografis dan administratif sangat strategis¹².

Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melumpuhkan dan menghilangkan "*whatever remained of the provincial administration independent existence*". Berdasarkan aturan ini, posisi raja Negeri ataupun Gubernur tidak lagi bersifat '*semi-hereditary*'. Raja Siam diberi kuasa untuk menunjuk atau melucut raja Negeri atau Gubernur. Raja Negeri tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati (*phu samret Ratchakan*) di tingkat negara. Mereka juga hanya dianggap

¹¹Pamungkas, Cahyo. 2004. "The State Policies Towards Southern Border Provinces", dalam *Multiculturalism, Separatism, and Nation State Building in Thailand*, Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI). Hal. 26.

¹²Yuniarto, Paulus Rudolf. 2004. "*Integration of Pattani Malays: a Geopolitical Change Perspective*", dalam *Multiculturalism, Separatism and Nation State Building in Thailand*, Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (Indonesia). Hal. 54.

sebagai seorang pejabat pemerintah (*phu wa Ratchakan*). Peraturan ini juga mencabut beberapa keistimewaan yang ada pada Raja-raja negeri. Raja-raja negeri tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menunjuk pejabat senior pemerintah kecuali Pendakwaraya (*yokkrabat*) dan Pegawai pajak (*phu Chuai*) saja. Sungguhpun begitu, sebelum penunjukan dibuat, Raja negeri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau izin Komisaris Tinggi Wilayah yang berkenaan. Sebaliknya, Komisaris Tinggi wilayah berwenang untuk melantik lima orang pejabat, dua adalah penolong Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu, Raja-Raja Negeri juga kehilangan sebagian dari hasil negeri. Mereka juga tidak diperbolehkan terlibat dalam bisnis ataupun menyewakan pajak (*tax-farms*). Mereka tidak diperbolehkan memiliki penghasilan sampingan selain dari gaji yang dibayar oleh Pemerintah pusat. Peraturan itu juga menegaskan bahwa Gubernur bertanggung jawab kepada Komisaris Tinggi. Gubernur tidak memiliki kekuasaan atas staf bawahan. Setiap tindakan yang diambil oleh Gubernur harus dilaporkan kepada Komisi Tinggi Provinsi dalam waktu tujuh hari setelah tindakan itu diambil¹³.

Berlakunya sistem *Thesaphiban* memberikan dampak yang signifikan terhadap kedaulatan dan kewibawaan pembesar-pembesar Melayu di Thailand Selatan. hal ini menyebabkan ketidakpuasan pembesar-pembesar Melayu yang disebabkan karena gubernur yang dikirim oleh pemerintah Thailand untuk memimpin di wilayah Thailand Selatan tidak mengetahui bahasa dan adat

¹³Mahmud, Nik Anuar Nik, Sistem Thesaphiban dan Kesannya ke Atas Kedaulatan dan Kwibawaan Raja-raja Melayu Patani. Pekan Bangi : University Kebangsaan Malaysia

istiadat masyarakat Melayu Thailand Selatan. Gubernur yang dikirim pemerintah Thailand tidak jarang memiliki pandangan yang berbeda dengan pembesar-pembesar Pattani terutama dalam perpajakan dan peraturan lokal. Selain itu sistem ini berdampak pada peraturan-peraturan yang berlaku di Thailand Selatan. Seperti pelarangan penduduk Muslim untuk duduk di parlemen. Selain itu adanya diskriminasi politik bagi penduduk muslim di Thailand Selatan. Hal ini dapat dilihat dari tata pemerintahan dimana ada pembatasan suku melayu di wilayah Patani untuk duduk di parlemen atau untuk bekerja di pemerintahan¹⁴.

Pada Tahun 1932 terjadi revolusi di Thailand yang hingga akhirnya sistem monarki absolut Thailand berganti menjadi sebuah sistem monarki parlementer yang keanggotannya dari parlemen tersebut didominasi oleh orang-orang militer. Pergantian tersebut membuat kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintahan pusat Thailand terhadap wilayah-wilayah di Thailand Selatan. Adanya kebijakan baru tersebut membuat hilangnya otoritas penduduk di wilayah Thailand Selatan dalam mengurus wilayahnya karena harus mengikuti kebijakan kerajaan Thailand yang baru. Hal ini membuat penduduk di Thailand Selatan menentang yang pada akhirnya muncul gerakan separatis yang ingin memperoleh otonomi khusus atau memerdekakan diri akibat adanya marginalisasi yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di bagian Thailand Selatan.

Gambar 3.3. Bendera Kelompok Separatis Revolusi Nasional (BRN)

¹⁴*Ibid.*



Sumber: *Thailand* dalam <http://markodehaeck.free.fr/TH.htm>.

Pada tahun 1997 para pemberontak melakukan operasi militer dengan kode sandi operasi daun gugur (*operation falling leaves*). Seiring dengan semakin meningkatnya intensitas konflik di Thailand Selatan. Pemerintah Thailand pun melakukan sedikit perubahan strategi dalam meredam konflik. Lobi dengan pemerintah Malaysia ditingkatkan dimana hasilnya, Mahathir Muhammad yang merupakan perdana menteri Malaysia saat itu setuju untuk melakukan kerjasama lintas perbatasan dengan aparat Thailand¹⁵. Kerjasama tersebut berbuah manis bagi Thailand karena berkat kerjasama tersebut berhasil membuat Thailand Selatan selama beberapa tahun memasuki periode damai untuk sementara. Bahkan provinsi-provinsi di wilayah Thailand Selatan sempat mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah Thailand dengan harapan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Thailand Selatan bisa terakomodasi dan masyarakat Thailand Selatan diharapkan tidak akan melakukan pemberontakan lagi. Walaupun pada awalnya kelihatan menjanjikan, aneka kebijakan tersebut dalam praktiknya tidak diikuti dengan perbaikan kualitas infrastruktur, penyerapan orang melayu lokal ke dalam birokrasi dan pemangkasan pengangguran yang ada di Thailand Selatan. Puncaknya yaitu

¹⁵Walker, P. Denis. 2005. *Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Sothern Thailand (Pattani) 1945-2005*, University Kebangsaan Malaysia Islamyat (27) 5. Hal. 101

ketika pemerintah Thailand Selatan pada tahun 2001 membubarkan badan otonomi khusus Thailand Selatan. Hal ini membuat situasi politik dan keamanan di Selatan Thailand kembali memanas dan situasi politik di Thailand Selatan sampai sekarang masih belum stabil.

1. Sejarah Thailand Selatan

Provinsi-provinsi Thailand Selatan yang meliputi Pattani, Yala, Satun, Songkhla dan Narathiwat merupakan wilayah Kesultanan Pattani yang awalnya merupakan kerajaan tertua di Semenanjung Malaya bernama Langkasuka, yang berdiri pada abad ke-2.¹⁶ Ia berulang kali menjadi wilayah vasal kerajaan lain seperti Sriwijaya (Sumatera), Nakhon Si Thammarat, Sukhothai hingga kembali menjadi wilayah otonom pada abad ke-15 dan menjadi kerajaan Islam bernama Kesultanan Pattani.

Sebagai wilayah otonom, perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di Pattani berkembang pesat. Hubungan diplomatik terjalin dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Pattani jadi satu titik penting dalam perniagaan Selat Malaka. kawasan itu meningkat menjadi satu entitas sosio-politik religius, dan terus menikmati identitas penuh yang terpisah dari kerajaan Thai-Buddha yang telah berdiri di utara¹⁷.

Pattani sempat berjaya di era Sultan Muzaffar Shah pada pertengahan abad ke-16. Sultan mendirikan masjid pertama, Krisek atau Krue Se, di

¹⁶MelayuOnline.com. 2008. *Kingdom of Pattani*.

<http://melayuonline.com/eng/history/dig/99/pattani-kingdom>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 15.40 WIB.

¹⁷ Chalk, Peter. 2008. *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand -- Understanding the Conflict's Evolving Dynamic*. National Defense Research Institute: Santa Monica

provinsi Pattani yang berarsitektur Timur Tengah. Zaman keemasan berlanjut para era empat ratu yang memerintah sejak 1584: Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Ungu, dan Ratu Kuning. Kekuatan ekonomi dan militernya mampu menghadapi empat kali invasi kerajaan Siam dengan bantuan kesultanan Pahang dan Johor yang kini menjadi bagian dari Malaysia.

Pada abad ke-17, kerajaan Pattani muncul sebagai pusat utama ilmu pengetahuan Islam di dunia Melayu, dihormati oleh banyak kesultanan, setara dengan kesultanan Aceh yang prestisius. Pattani mengalami kemunduran ketika Ayudhya atau Ayutthaya yang merupakan cikal-bakal kerajaan Siam, menginvasinya pada 1688. Sultan Muhammad, yang berkuasa di Pattani saat itu, terbunuh dalam pertempuran. Kota Pattani dibumihanguskan. Pattani sendiri mengalami konflik internal, yang kian memudarkan kejayaan mereka.

Pattani kembali merdeka setelah Ayutthaya kalah perang dari Burma. Setelah lama berada di bawah cengkeraman Burma, pada abad ke-18. Setelah dikuasai oleh kerajaan Siam, wilayah Pattani menjadi daerah yang merupakan wilayah Thai-Budha. Hal ini didasarkan atas perjanjian penentuan daerah antara Kerajaan Thailand pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn dan pemerintahan kolonial Inggris di Malaya, yang mengharuskan wilayah Pattani dan sekitarnya menjadi wilayah kekuasaan Thailand pada 1902. Pada tahun 1904 dan 1909, di bawah dua kesepakatan Perjanjian Anglo-Siam (*Anglo-Siamese Treaties*), Siam mengakui empat

negara Melayu Selatan atas Inggris dengan imbalan pengakuan kedaulatan Siam atas Pattani. Perjanjian terakhir mengantarkan dalam periode baru pemerintahan asing yang memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat Melayu dan otoritas keagamaan dan politik di selatan, yang memisahkan antara Pattani dan negara-negara Melayu Kelantan, Perak, Kedah dan Perlis (sekarang Malaysia). Atas dasar perjanjian tersebut maka sampai sekarang Pattani kekal jadi milik Thailand¹⁸.

2. Identitas Agama dan Budaya Masyarakat Thailand Selatan

Masyarakat yang mendiami Thailand Selatan yang didominasi oleh etnis Melayu yang beragama Islam. Jumlah etnis Melayu yang mendiami Thailand Selatan sekitar 3 persen dari jumlah populasi Thailand¹⁹. Mereka merupakan minoritas terbesar kedua di Thailand setelah etnis Tionghoa yang berjumlah sekitar 15 persen dari populasi Thailand. Sekitar Abad ke 15 agama Islam sudah masuk ke wilayah Thailand Selatan dan dijadikan sebagai agama resmi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Wilayah Thailand Selatan seperti kesultanan Pattani. Agama Islam telah memperkuat identitas budaya dan agama masyarakat Thailand Selatan sehingga menjadi satu kesatuan sistem tidak hanya dalam aspek identitas agama melainkan dalam aspek kehidupan misalnya dalam aspek politik, sosial-budaya dan ekonomi. Hal ini terbukti dengan perpindahan kerajaan Langkasuka menjadi sebuah kerajaan Melayu Islam (Kesultanan Pattani)

¹⁸Chandran, j. 1997. *Perjanjian 1909 Antara Inggris Dengan Siam Serta Latar Belakangnya*. Universiti Kebagsaan Malaysia.

¹⁹Onlychaam.com. *Ethnic Minority in Thailand*. <http://www.onlychaam.com/ethnic-groups-in-thailand/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 07.10 WIB.

dengan sistem politik yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan pada abad ke 15 dan menjadi agama Mayoritas yang dianut masyarakat Pattani (Thailand Selatan). Bahasa Melayu menjadi bahasa utama di Thailand Selatan karena mayoritas dari penduduk Thailand Selatan berasal dari etnis Melayu. Bahasa Melayu di Thailand Selatan dikenal dengan Bahasa Jawi. Berdasarkan penggunaan bahasa, penggunaan Bahasa Melayu di Thailand Selatan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Kelompok yang bisa berbicara menggunakan Bahasa Melayu dialek Pattani dan dialek Kelantan (Malaysia) serta menggunakan aksara Jawi (aksara arab gundul/pegon).
- b. Kelompok yang dapat berbicara menggunakan Bahasa Melayu dialek Pattani namun tidak mampu membaca aksara Jawi. Kelompok ini biasanya juga mampu dan dapat berbicara menggunakan bahasa nasional Thailand (Bahasa Thai).
- c. Kelompok yang sama sekali tidak bisa berbicara menggunakan Bahasa Melayu tetapi pandai menggunakan bahasa Thai. Kategori ini banyak ditemukan di provinsi Satun²⁰.

Identitas Melayu-Islam di Thailand Selatan yang paling signifikan dalam peradaban Melayu adalah manuskrip dan naskah-naskah yang ditulis menggunakan aksara Jawi. Penulisan Bahasa Melayu dengan menggunakan aksara Jawi menjadi kekuatan besar dibalik penyamaan Bahasa Melayu dan

²⁰Abdullah, Ahmad Amir Bin. 2009. *Melayu Petani: A Nation Survives*. <https://www.scribd.com/document/17762720/Melayu-Petani-doc-an-Article-for-Jurnal>. Hal. 4, diakses pada tanggal 23 Desember 2016 WIB.

Islam, ke manapun Islam pergi membawa pesan Al-Quran dan aksara Arab, sehingga memiliki keterkaitan tidak hanya dalam aspek komunikasi dan kebudayaan Melayu, melainkan juga dengan aspek ajaran, dakwah dan ritus-ritus Islam. Sehingga Bahasa Melayu sangat menyatu dengan agama Islam, bahkan dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan. Bahkan teks-teks Jawi tersebut sangat dilestarikan di kegiatan pendidikan (pondoh/pondok) dalam kegiatan pembacaan kitab kuning yang menggunakan Bahasa Jawi (Melayu)

3. Situasi Ekonomi di Thailand Selatan

Wilayah Thailand Selatan memiliki wilayah yang tidak terlalu luas namun memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Terdiri dari lembah yang subur dan daerah pengangkap ikan karena wilayah Thailand Selatan terletak antara laut andaman di barat dan Teluk Thailand di timur. Wilayah Thailand Selatan juga memiliki cadangan mineral termasuk timah, emas, wolfram, mangan dan gas alam. Sebagian besar masyarakat Thailand Selatan berprofesi sebagai wiraswasta dan memiliki perkebunan sendiri seperti tanaman karet, kelapa dan tanaman tropis seperti rambutan dan durian. Sebagian yang lain berprofesi sebagai petani yang menanam padi dan sebagian yang lain berprofesi sebagai nelayan. Selain itu terdapat masyarakat Thailand Selatan yang bekerja sebagai pedagang dan mayoritas yang diperdagangkan adalah timah dan ternak.

Semenjak wilayah Thailand Selatan menjadi bagian Thailand perekonomian masyarakat Thailand Selatan semakin menurun dan memburuk. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand dalam membeli hasil pertanian dan peternakan dari masyarakat Thailand Selatan dengan harga yang sangat rendah, menambah penderitaan ekonomi bagi masyarakat Thailand Selatan. Pada dasarnya wilayah Thailand Selatan sangat kaya akan sumber daya alam, namun sumber daya tersebut hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat wilayah Selatan karena sebagian besar dari hasil kekayaan alam di Thailand Selatan dinikmati oleh Bangkok.

Sebetulnya, pemerintah Thailand telah mengenalkan program-program tertentu kepada masyarakat Thailand Selatan, namun mereka menganggap program dan proyek tersebut merupakan sebagian rencana pemerintah Thailand untuk menenggelamkan penduduk Muslim dan etnis Melayu di Thailand Selatan dan akan membuat wilayah Thailand Selatan didominasi oleh etnis Thai yang beragama Budha²¹. Kegagalan ekonomi penduduk Thailand Selatan ditanggapi pemerintah dengan tidak bertanggung jawab, dengan alasan dana yang tidak memadai. Akibat perekonomian masyarakat Thailand Selatan semakin tergeser, akan tetapi kekayaan alam mereka terus dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah pusat dengan alasan sebagai pembangunan infra-struktur. Hal ini diperparah dengan adanya situasi politik yang tidak stabil dan adanya konflik yang berkepanjangan membuat situasi ekonomi di Thailand Selatan makin memburuk.

²¹W.K., Che Man. 1990, *Muslim Separatism The Moros of Southern Philippines and The Malays of Southern Thailand*, Singapura: Oxford University Press. Hal. 39

C. Sejarah dan Dinamika Konflik Thailand Selatan

Konflik Thailand Selatan terjadi antara Pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontak Muslim Melayu yang berbasis di wilayah Thailand Selatan. Konflik terjadi di wilayah Thailand Selatan yang telah dipecah menjadi beberapa provinsi, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla. Konflik kekerasan terjadi sejak tahun 2004 yang ditandai oleh dua insiden, yaitu: pembantaian terhadap masyarakat Pattani yang terjadi di Masjid Krue Se di Pattani dan insiden mematikan berupa pengeboman di Tak Bai, Narathiwat. Namun, secara historis, Konflik yang terjadi di Thailand Selatan sudah berlangsung lebih dari tiga ratus tahun. Konflik yang terjadi di Thailand tepatnya Thailand bagian Selatan sudah berlangsung sejak Ayutthaya menginvasi Pattani tahun 1688. Sultan Muhammad, yang berkuasa di Pattani saat itu, terbunuh dalam pertempuran. Kota Pattani dibumihanguskan.

Pattani sempat merdeka setelah Ayutthaya kalah perang dari Burma (Myanmar). Setelah lama berada di bawah cengkeraman Burma, pada abad ke-18, Dinasti Chakkri di bawah Raja Rama I kemudian berhasil menyatukan kembali kerajaan Siam. Siam bangkit kembali dan bahkan lebih kuat. Dipimpin Pangeran Surasi, adik dari Raja Rama I, pasukan Siam menginvasi Pattani pada 1786 dan membagi kerajaan Muslim itu menjadi beberapa provinsi yang terpisah dari Pattani seperti Yala, Satun, Songkhla, dan

Narrathiwat²². Penaklukan Siam atas Pattani ini pada akhirnya mengakibatkan konflik antara penduduk Thailand Selatan yang merupakan penduduk Melayu dengan pemerintah Thailand.

Setelah dikuasai oleh kerajaan Siam, wilayah Pattani menjadi daerah yang merupakan wilayah Thai-Budha. Hal ini didasarkan atas perjanjian penentuan daerah antara Kerajaan Thailand pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn dan pemerintahan kolonial Inggris di Malaya, yang mengharuskan wilayah Pattani dan sekitarnya menjadi wilayah kekuasaan Thailand pada 1902. Pada tahun 1904 dan 1909, di bawah dua kesepakatan Perjanjian Anglo-Siam (*Anglo-Siamese Treaties*), Siam mengakui empat negara Melayu selatan atas Inggris dengan imbalan pengakuan kedaulatan Siam atas Patani. Sebenarnya, masyarakat Muslim di Thailand lebih suka bergabung dengan Malaya, sekalipun di bawah pemerintahan Inggris, karena memiliki akar budaya yang sama.

Perjanjian terakhir mengantarkan dalam periode baru pemerintahan asing yang memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat Melayu dan otoritas keagamaan dan politik di selatan, yang memisahkan antara Patani dan negara-negara Melayu Kelantan, Perak, Kedah dan Perlis (sekarang Malaysia)²³. Pada tahun 1910, syekh sufi menyatakan jihad terhadap pemerintah Siam dan

²²Ishii, Yoneo.1998. *The Trade From Southeast Asia: Translations from the Tosen Fusetsu-gaki 1674-1723*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura

²³Astroawani.com. 2016. *Kesahihan Perjanjian British-Siam 1909: Apa yang rakyat Malaysia perlu tahu*, <http://www.astroawani.com/berita-malaysia/kesahihan-perjanjian-british-siam-1909-apa-yang-rakyat-malaysia-perlu-tahu-113672>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 15.39 WIB.

meluncurkan dua pemberontakan. Keduanya dipadamkan oleh kekuatan militer Thailand dan para pemimpin Muslim Melayu ditangkap.

Pada Tahun 1932 terjadi revolusi di Thailand yang hingga akhirnya sistem monarki absolut Thailand berganti menjadi sebuah sistem monarki parlementer yang keanggotannya dari parlemen tersebut didominasi oleh orang-orang militer²⁴. Pergantian tersebut membuat kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintahan pusat Thailand terhadap wilayah-wilayah di Thailand Selatan. Adanya kebijakan baru tersebut membuat hilangnya otoritas penduduk di wilayah Thailand Selatan dalam mengurus wilayahnya karena harus mengikuti kebijakan kerajaan Thailand yang baru. Misalnya pemerintah Thailand memberlakukan berbagai program untuk menggantikan identitas agama dan budaya dalam hal ini Melayu-Muslim digantikan dengan Budhaisme. Peraturan-peraturan berbasiskan Islam juga dihapuskan dan masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai menggantikan Bahasa Melayu yang selama ini mereka gunakan. Akibat dari penghapusan terhadap sejumlah budaya dan peraturan ini membuat penduduk di Thailand Selatan menentang yang pada akhirnya muncul gerakan separatis yang ingin memperoleh otonomi khusus atau memerdekakan diri akibat adanya marjinalisasi yang dialami oleh masyarakat atau etnis yang tinggal di bagian Selatan Thailand. Kesenjangan ekonomi dan pembangunan serta pendapatan perkapita penduduk antara wilayah Thailand Selatan dengan wilayah lain di Thailand juga turut memicu konflik di

²⁴Zurita, Ahmad. 2011. *Revolusi Siam 1932*. <https://www.scribd.com/doc/73353445/Revolusi-Siam-1932>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 15.44 WIB.

Thailand Selatan. Konflik semacam ini timbul akibat dari adanya kekecewaan dan kecemburuan sosial, sehingga masyarakat Thailand Selatan ingin mengatur diri sendiri dengan cara otonomi atau memerdekakan diri. Pada 1947, Haji Sulong bin Abdul Kadir, kepala Dewan Provinsi Islam Pattani, mempelopori perlawanan terhadap Bangkok²⁵. Dia memimpin kampanye petisi penuntutan hak otonomi, bahasa, budaya, dan penerapan hukum Islam. Haji Sulong, bersama beberapa pemimpin agama dan anggota parlemen Muslim, ditangkap, dibebaskan, lalu hilang tak jelas rimbanya. Dia menjadi simbol perlawanan etnis Melayu-Muslim terhadap Thailand²⁶.

Gambar 3.4. Bendera Kelompok Gabungan Melayu Pattani Raya (GAMPAR)



Sumber: *Thailand* dalam <http://markodehaeck.free.fr/TH.htm>.

Gerakan perlawanan terus menguat. Gabungan Melayu Pattani Raya (GAMPAR) terbentuk pada 1950 dengan tujuan menggabungkan provinsi-provinsi Muslim Thailand ke dalam Malaya. Tak lama berselang, Tengku Jalal Nasir, dikenal dengan Adul Na Saiburi, wakil Ketua GAMPAR dan mantan anggota parlemen Narathiwat mendirikan Barisan Nasional

²⁵ Yazid, Yasril. *Konflik Minoritas Melayu dan Militer Thailand Analisis Terhadap Krisis Politik di Selatan Thailand*, Universitas Islam Negeri Suska Riau.

²⁶ Chiong Liow, Joseph. 2009. *Islam, Education, and Reform in Southern Thailand: Tradition & Transformation*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura

Pembebasan Pattani pada 1959, yang memicu bentrokan dengan pasukan pengamanan di hampir seluruh provinsi di Thailand Selatan. Pada pertengahan 1970, lebih dari 20 organisasi separatis muncul di perbatasan Thailand dengan Malaysia. Pemberontakan-pemberontakan Islam terus pecah untuk menuntut kemerdekaan wilayah Kerajaan Pattani sebelumnya.

Pada tahun 1997 para pemberontak melakukan operasi militer dengan kode sandi operasi daun gugur (*operation falling leaves*). Dalam operasi militer tersebut, para pemberontak melakukan aksi-aksi teror seperti penembakan, pengeboman dan pembakaran yang terkoordinir dimana aksi-aksi tersebut mengakibatkan 9 korban tewas dan kerugian material yang cukup signifikan.

Seiring dengan semakin meningkatnya intensitas konflik di Thailand Selatan. Pemerintah Thailand pun melakukan sedikit perubahan strategi dalam meredam konflik. Lobi dengan pemerintah Malaysia ditingkatkan dimana hasilnya, Mahathir Muhammad yang merupakan perdana menteri Malaysia saat itu setuju untuk melakukan kerjasama lintas perbatasan dengan aparat Thailand. Kerjasama tersebut berbuah manis bagi Thailand karena berkat kerjasama tersebut, tokoh-tokoh penting dari kelompok pemberontak Thailand Selatan yang selama ini bersembunyi di Malaysia berhasil dipulangkan ke Thailand. Hal ini mengakibatkan kekuatan pemberontak Thailand Selatan menurun dan Thailand Selatan selama beberapa tahun memasuki periode damai untuk sementara. Bahkan provinsi-provinsi di wilayah Thailand Selatan sempat mendapatkan otonomi khusus dari

pemerintah Thailand dengan harapan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Thailand Selatan bisa terakomodasi dan masyarakat Thailand Selatan diharapkan tidak akan melakukan pemberontakan lagi.

Walaupun pada awalnya kelihatan menjanjikan, aneka kebijakan tersebut dalam praktiknya tidak diikuti dengan perbaikan kualitas infrastruktur, penyerapan orang Melayu lokal ke dalam birokrasi dan pemangkasan pengangguran yang ada di Thailand Selatan. Puncaknya yaitu ketika pemerintah Thailand Selatan pada tahun 2001 membubarkan badan otonomi khusus Thailand Selatan.

Tidak mulusnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Thailand dalam menangani masalah-masalah sosial di Thailand Selatan diikuti dengan meletupnya kembali aktivitas pemberontakan. Diakhir tahun 2001, 5 aksi penyerangan yang terkoordinir yang dilakukan oleh kelompok bersenjata telah menewaskan 5 anggota polisi dan 1 relawan keamanan desa. Dan dari tahun 2002 sampai tahun 2003 penyerangan di Thailand Selatan terus mengalami peningkatan dari 75 kasus di tahun 2002 menjadi 119 kasus pada tahun 2003.

Puncak kekerasan terjadi pada tahun 2004, hal ini ditandai oleh dua peristiwa yaitu serangan terhadap Masjid Krue Se dan insiden kekerasan di Tak Bai di Narathiwat. Serangan terhadap Masjid Krue Se terjadi pada tanggal 28 April 2004 ketika militer Thailand menyerang Masjid Krue Se yang ada di Pattani dan membantai sekelompok orang yang diduga

pemberontak. Korban tewas saat itu mencapai 37 orang yang berasal dari militan. Sementara itu, insiden kekerasan Tak Bai terjadi pada tanggal 25 Oktober 2004. Serangan dimulai ketika Distrik Tak Bai diserang oleh sekelompok orang. Beberapa orang dipenjarakan oleh polisi Thailand terkait serangan tersebut. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran masyarakat Thailand Selatan di luar kantor polisi distrik. Polisi Thailand menanggapi demonstrasi dengan menempuh cara kekerasan.

Kerusuhan terjadi hingga menewaskan 86 orang dari masyarakat Thailand Selatan. Sejumlah 1300 orang ditangkap dan dibawa dari Tak Bai ke kamp militer di Pattani²⁷. Enam orang meninggal di tempat kejadian dan 78 meninggal karena kekurangan oksigen ketika berada di dalam truk saat mereka dalam perjalanan menuju kamp militer. Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar. Spekulasi bermunculan di antaranya tuduhan kekerasan yang berlebihan, metode yang terlalu keras, serta pelanggaran hak asasi manusia. Perdana Menteri Thaksin kemudian dituntut untuk segera memberikan pernyataan maaf, tetapi hal tersebut tidak dipenuhi²⁸.

Pemerintah membentuk komisi pencarian fakta independen untuk menyelidiki bagaimana tewasnya para demonstran. Hasil temuan tim tersebut adalah kematian mereka tidak disengaja. Atas insiden ini pemerintah menangkap empat guru Islam yang dianggap terlibat dalam insiden ini.

²⁷ Max L. Gross. *A Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia* (Washington DC: National Defense Intelligence College, 2007), 79.

²⁸ Gatra.com. 2004. *Raja Thailand: Pelunak Pendekatan di Selatan*. <http://arsip.gatra.com/2004-11-10/artikel.php?id=48691>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 11.40 WIB.

Pemerintah menganggap bahwa pondok menjadi tempat berkembangnya pemberontak. Sejumlah peristiwa yang terjadi menjelaskan bahwa kejadian tersebut memperlihatkan pola-pola persamaan dengan sejarah Pattani pada awal abad kedua puluh. Insiden ini juga mencerminkan manifestasi perasaan ketidakpuasan rakyat Thailand Selatan terhadap pemerintahan Bangkok. Keputusan pemerintah Thailand menggunakan kekerasan untuk mengamankan keadaan memberikan implikasi negatif sehingga wilayah tersebut terus menjadi daerah konflik.

Thaksin Shinawatra, Perdana Menteri Thailand mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan persoalan. Namun, menurut Abuza, langkah tersebut dinilai kurang bijak karena Thaksin terlalu menginginkan hasil yang instan. Langkah yang diambil oleh Thaksin adalah merotasi kepemimpinan Pasukan Keempat di Thailand Selatan dengan sangat membingungkan. Enam komandan silih berganti memimpin pasukan tersebut selama tiga tahun. Akibatnya 60.000 pasukan keamanan yang dinilai kuat menjadi tidak terorganisir. Kondisi ini yang kemudian menguntungkan kelompok pemberontak untuk memperkuat diri mereka.

Pada bulan September 2006, Thaksin Shinawatra dikudeta oleh militer Thailand. Jenderal Surayud Chulanont yang menggantikannya menjanjikan perbaikan dan permohonan maaf kepada masyarakat Thailand Selatan. Kudeta militer tahun 2006 mengambil tindakan rekonsiliasi terhadap konflik selatan. Perdana Menteri yang baru, Jenderal Surayud, meminta maaf atas kesalahan penanganan krisis oleh pemerintah sebelumnya, Thaksin. Dia

mengumumkan amnesti bagi mereka yang mengundurkan diri dari gerakan pemberontak. Dia meyakinkan generasi tua dari gerakan separatis (PULO dan BRN) memainkan peran mediasi antara pemerintah dan kelompok pemberontak muda yang memiliki pendekatan lebih radikal. Namun, program perbaikan tersebut hanya sedikit yang terlaksana. Sementara itu kelompok pemberontak seakan tidak peduli dengan siapa yang menduduki kekuasaan di Bangkok. Akibat lemahnya pemerintahan Chulanont.

Pada bulan Mei 2007, kekerasan kembali terjadi di selatan yang menewaskan empat orang. Pada Januari 2008, kekuasaan di Thailand dipegang oleh *People's Power Party* (PPP) menggantikan Jenderal Chulanont. Namun, tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, PPP tidak mampu memperbaiki keadaan di Thailand Selatan. PPP yang khawatir militer Thailand akan melakukan kudeta, memberikan kuasa penuh kepada tentara di wilayah selatan. Hal tersebut justru memicu terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM. Pada Desember 2008, kekuasaan PPP atas pemerintahan Thailand berakhir. Thailand kemudian diperintah oleh Abhisit Vejjajiva dari Partai Demokrat. Vejjajiva menjanjikan perbaikan di selatan menjadi prioritasnya.

Pemerintahan Vejjajiva awalnya memberi harapan tersebut karena dinilai lebih demokratis dari pendahulunya. Namun, Partai Demokrat dihadapkan pada kelompok oposisi pro-Thaksin mengganggu stabilitas politik di Thailand. Kondisi ini membuat Vejjajiva tidak bisa berbuat banyak terhadap

Thailand Selatan. Bahkan, dalam 30 bulan memerintah, dia hanya empat kali melakukan perjalanan sehari ke selatan.

Pada Maret 2012, terjadi kembali ledakan di Yala. Jumlah korban tewas sedikitnya 7 orang, sedangkan korban luka-luka sedikitnya 70 orang. Sedangkan di wilayah lainnya, Narathiwat juga mengalami ledakan bom pada saat dua kendaraan patroli sedang melewati jalan. Satu orang tentara mengaami luka serius dalam serangan tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2011 militer Thailand menematkan sekitar 60.000 pasukan di wilayah tersebut untuk mengatasi pemberontakan. Meskipun hingga sekarang konflik di Thailand Selatan terus berlanjut, namun konflik kekerasan mengalami penurunan sejak tahun 2007 yang dianggap sebagai puncak dari gelombang kekerasan yang sudah terjadi sejak tahun 2004. Namun perlawanan pemberontak di Thailand Selatan belum terselesaikan hingga kini dan kekerasan masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Hingga awal Januari 2016, telah lebih dari 6500 orang menjadi korban dari konflik kekerasan tersebut²⁹. Secara umum, berdasarkan Yuniarto dalam jurnal Integrasi Muslim Pattani: Reidentitas Sosial atas Dominasi “Nasional” Thailand dan Fitra dalam jurnal Upaya Pemerintah Thailand dalam Penyelesaian Konflik Thailand Selatan, kronologi berjalannya konflik di Thailand Selatan dapat dirangkum menjaditabel berikut:

²⁹Kompas.com. 2016. Bom Hantam Sekolah di Thailand Selatan, Bocah Empat Tahun Tewas. <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/06/15011701/bom.hantam.sekolah.di.thailand.selatan.bocah.4.tahun.tewas>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 12.00 WIB

Tabel Kronologi Konflik Thailand Selatan 1688-2016

Tahun	Peristiwa
1688	kerajaan Pattani di Invasi oleh Ayutthaya yang membuat gangguan politik di Pattani selama 5 dekade dan mengganggu perdagangan internasional Pattani.
1785	Kerajaan Pattani diserang oleh kerajaan Siam (Dinasti Chakri).
1786	Kerajaan Pattani berhasil dikuasai oleh Kerajaan Siam (Dinasti Chakri).
1808	Kerajaan Pattani dipecah menjadi 7 wilayah.
1838	Kebangkitan anti-Siam yang disebabkan karena ketimpangan sosial serta keinginan untuk memerdekakan kerajaan Pattani.
1897	Sistem Thesaphiban diberlakukan.
1901	Kerajaan Melayu Pattani melakukan pemberontakan terhadap Siam.
1909	Perjanjian Anglo-Siam terbentuk. Pattani, Yala, Satun, Songkhla dan Narathiwat dikuasai Siam sedangkan Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis yang semula dikuasai Siam diambil alih oleh Inggris.
1922	Terjadi pemberontakan yang melibatkan pemimpin agama dan kaum bangsawan untuk kemerdekaan karena adanya penghapusan syariat Islam.
1938	Rezim Phibul Songkram berkuasa dan peraturan-peraturan lokal berbasis Islam dihapuskan dan masyarakat Thailand Selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai, menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Hal ini bertujuan untuk integritas nasional Thailand namun ditentang oleh penduduk Thailand Selatan.
1947	Masyarakat Pattani dipimpin oleh Haji Sulong bin Abdul Kadir menuntut hak otonomi, bahasa, budaya dan penerapan hukum Islam di Thailand Selatan.
1948	Muncul sebuah kelompok organisasi Gabungan Melayu Pattani Raya (GAMPAR) yang menginginkan Melayu di Thailand Selatan

	untuk merdeka dari Thailand.
1970	Lebih dari 20 organisasi separatis muncul di perbatasan Thailand dan Malaysia yang menuntut kemerdekaan dari Thailand.
1975	Militer Thailand melakukan pemaksaan kepada enam orang pemuda Melayu Islam untuk menyembah patung Budha dan kemudian dibunuh.
1997	Pemberontak melakukan operasi militer dengan kode sandi operasi daun gugur (<i>Operation falling leaves</i>).
1998	Thailand dan Malaysia melakukan diplomasi untuk bekerjasama menyelesaikan konflik untuk pertama kalinya.
2001-2004	Setelah beberapa tahun dalam fase damai, tahun 2001 konflik kembali memanas, terjadi penembakan, pembakaran dan pengeboman di Thailand Selatan dan korban pun berjatuhan.
2005	Konflik mencapai puncaknya, pada bulan agustus 2013 terdapat 131 pelarian dari Thailand Selatan mengungsi ke Malaysia.
2006	Pengeboman, penembakan dan pembakaran masih terjadi.
2007	konflik menurun namun masih terdapat insiden dan teror di wilayah Thailand Selatan.
2008-2016	Konflik di Thailand Selatan masih berlangsung, hampir tiap bula terjadi penembakan, pengeboman, pembakaran maupun penculikan di Thailand Selatan. Hal ini membuat korban berjatuhan. Korban Jiwa dari tahun 2001-2016 mencapai lebih dari 6.500 orang.

D. Faktor-faktor Pemicu Konflik di Thailand Selatan

Konflik yang berkepanjangan yang terjadi di wilayah Thailand Selatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu³⁰:

³⁰Fitra, Lia Aprilia. 2016. *Upaya Pemerintah Thailand Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Selatan Tahun 2004-2009*, FisipUnmul, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 2, 2016: 547-566

1. Faktor Politik

a. Adanya kebijakan *Nikhom Sang Tong Eng*.

Faktor kebijakan Pemerintah Thailand yang tidak berpihak kepada penduduk Thailand Selatan yaitu Adanya kebijakan dari pemerintah Thailand *Nikhom Sang Tong Eng* yaitu memindah orang Thai-Buddha yang berasal dari sebelah Timur, Barat dan Utara Thailand untuk membentuk penempatan baru di Thailand Selatan dan diberitah secara percuma untuk di garap. Keadaan ini memberi tekanan kepada Orang Melayu Islam Patani karena sumber daya alam yang ada di wilayah mereka di garap oleh orang lain. Adanya kebijakan ini maka secara struktur demografi telah mengalami perubahan dari yang dulunya mayoritas menjadi minoritas. Hal ini bisa dilihat dari demografi provinsi Trang, Nakhon Si Thammarat, Pahattalung, Krabi dan lain-lain yang sekarang di dominasi oleh etnis Thai yang beragama Budha. Padahal sebelum Siam menjajah wilayah Selatan provinsi-provinsi tersebut merupakan daerah Melayu (Tanah Melayu) yang membentang dari Segenting Kra di Utara sampai Johor di Selatan. Selain itu nama-nama tempat di wilayah Thailand Selatan yang semula bernamakan Melayu diubah sesuai dengan lidah orang Thai seperti Bukit (Phuket), Jala (Yala), Terang (Trang), Segenting Kera (Segenting Kra), Mardelong (Patthalung) Singgora (Songkhla), Menara (Narathiwat), Setul (Satun), Cahaya (Chaiya) dan lain-lain.

b. Berlakunya Undang-Undang *Thesaphiban*.

Transisi politik terjadi di Thailand pada tahun 1897, sejak Kerajaan Siam melaksanakan Undang-Undang *Thesaphiban*. Dengan Undang-Undang itu, maka sistem pemerintahan kesultanan Melayu resmi dihapuskan. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bangkok pada tahun 1909, Patani telah diakui oleh Inggris sebagai bagian dari jajahan Siam walaupun tanpa mempertimbangkan keinginan penduduk asli Melayu Pattani. Sejak saat itu masyarakat Patani resmi hidup di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Meskipun melawan dan melakukan sejumlah pemberontakan, bahkan dengan meminta bantuan raja-raja Melayu, Singapura dan Inggris, namun Muslim Patani tetap saja tidak berhasil membebaskan diri dan wilayah mereka dari kekuasaan kerajaan Siam.

Secara politik wilayah Pattani berada dalam kekuasaan kerajaan Siam. Penaklukan ini berdampak pada peraturan-peraturan yang berlaku di Thailand Selatan. Seperti penghapusan bahasa Melayu dan pelarangan penduduk Muslim untuk duduk di parlemen serta penghapusan sistem pendidikan pesantren. Selain itu adanya diskriminasi politik bagi penduduk muslim di Thailand Selatan. Hal ini dapat dilihat dari tata pemerintahan dimana ada pembatasan suku melayu di wilayah Patani untuk duduk di parlemen atau untuk bekerja di pemerintahan. Hal ini yang pada akhirnya memicu konflik yang berkepanjangan³¹.

³¹*Ibid.*

2. Faktor Sosial-Ekonomi

1. Setelah adanya aneksasi yang dilakukan oleh kerajaan Siam maka wilayah Thailand Selatan yang dahulunya memiliki otoritas sendiri harus bergabung mengikuti kebijakan kerajaan Thailand. Akibat dari aneksasi terhadap Pattani raya oleh kerajaan Thailand maka secara resmi pula provinsi Melayu yang dahulunya adalah wilayah Pattani Raya menjadi bagian wilayah kerajaan Thailand (sub-ordinat Thailand). Oleh sebab itu, kerajaan Thailand pun memberlakukan kebijakan baru terhadap wilayah-wilayah tersebut. Misalnya dengan memberlakukan berbagai program untuk menggantikan identitas agama dan budaya Melayu-Muslim dengan Budhaisme. Selain itu peraturan-peraturan lokal berbasiskan Islam juga dihapuskan dan masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai (menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka gunakan). Hal tersebut pada gilirannya menimbulkan masalah baru bagi penduduk Thailand selatan yang tidak fasih berbahasa Thailand karena peluang mereka mendapatkan pekerjaan jadi menipis. Menipisnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan inilah yang pada akhirnya memicu kemarahan penduduk Pattani terhadap pemerintah.
2. Akibat adanya diskriminasi dibidang sosial, hal ini kemudian menimbulkan kesenjangan ekonomi antara wilayah Utara dan Selatan Thailand. Berdasarkan hasil kajian Dr. Srisompob tahun 2009 berkenaan ekonomi penduduk di tiga wilayah, seramai 699 orang

daripada 1,143 responden menyatakan mereka tidak cukup pendapatan. Mereka kehilangan peluang pekerjaan sehingga memicu konflik yang kian meruncing. Selain itu, berlaku ketidakseimbangan ekonomi karena jurang antara kaum yang menguasai ekonomi juga sangat ketara, kebanyakan perusahaan dalam bidang pertanian, perindustrian dan perikanan dikuasai oleh kaum Cina dan Thai-Budha. Kebanyakan yang menguasai sektor ekonomi seperti perindustrian, perkebunan dan perikanan berasal dari kalangan orang Thai-Budha dan Cina. Sehingga penduduk lokal (Melayu) tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain dan hanya mampu menjalankan usaha-usaha kecil. Sampai saat ini wilayah Thailand Selatan seperti provinsi Pattani, Satun, Yala dan Narathiwat merupakan provinis-provinis termiskin di Thailand³².

3. Faktor Sejarah dan Identitas (Agama dan Budaya)

- a. Secara historis penduduk Thailand selatan dahulunya merupakan kerajaan Melayu yang erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Malaysia. Bahkan pada masa kerajaan Langkasuka, wilayah Thailand Selatan menjadi satu kesatuan dengan wilayah Malaysia. Kerajaan-kerajaan yang ada di Thailand Selatan seperti kerajaan Pattani dan Singgora melakukan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Malaysia serta melakukan kawin silang antar kerajaan untuk memperkuat persekutuan. Hal ini kemudian yang membuat masyarakat

³²*Ibid.*

yang ada di Thailand Selatan merasa lebih dekat dengan Malaysia ketimbang dengan Thailand. Selain itu kerajaan Pattani sendiri merupakan salah satu kerajaan yang makmur dan independen pada zaman dahulu sebelum ditaklukkan oleh Siam (Thai)³³.

- b. Penduduk Thailand didominasi oleh etnis Melayu Islam sehingga adat dan tradisi yang mereka anut adalah budaya Melayu Islam. Pasca di satukannya wilayah Pattani dengan kerajaan Thailand maka kerajaan Thailand pun memberlakukan kebijakan baru terhadap wilayah-wilayah tersebut. Misalnya dengan memberlakukan berbagai program untuk menggantikan identitas agama dan budaya Melayu Islam dengan Budhaisme³⁴. kebudayaan Islam yang selama ini mereka anut sulit untuk dilakukan. Kesulitan ini ditandai dengan penghapusan peraturan-peraturan lokal berbasiskan Islam dan masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai-menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka gunakan. Konflik ini juga disebabkan kebijakan pemerintah. Thailand untuk mengubah kurikulum pesantren-pesantren di Thailand selatan menjadi kurikulum pendidikan berbau sekuler.

E. Dampak Konflik Thailand Selatan Terhadap Malaysia

Konflik yang terjadi di Thailand Selatan antara pemberontak dan pemerintah Thailand di wilayah Thailand Selatan memberikan beberapa dampak terhadap Malaysia. Hal ini disebabkan karena secara geografis

³³Melayuonline.com. 2010, Kerajaan Pattani. <http://melayuonline.com/ind/history/dig/99/kerajaan-pattani>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 13.55 WIB.

³⁴Ibid.

wilayah konflik yang terletak di Thailand Selatan berbatasan secara langsung dengan daratan Malaysia terutama wilayah Malaysia bagian Utara seperti negara bagian Kelantan, Perak, Kedah dan Perlis. Dampak konflik Thailand Selatan terhadap Malaysia diantaranya:

1. Dampak Dalam Bidang Politik

Konflik yang terjadi tahun 2004 dan tahun 2005 di Thailand Selatan berdampak pada hubungan diplomatik antara Malaysia dan Thailand. Konflik tersebut membuat hubungan antara Thailand dan Malaysia memanas. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2005 Malaysia menampung sebanyak 131 orang pengungsi yang berasal dari daerah Thailand Selatan. Dimana pemerintah Thailand meminta Malaysia untuk memulangkan pengungsi tersebut namun Malaysia tidak mau memulangkan pengungsi tersebut ke Thailand atas dasar kemanusiaan.

Menteri pertahanan Thailand yaitu Thammarak Isarangura Na Ayutthaya, mengemukakan bahwa, "Pulau Langkawi yang terletak Malaysia telah digunakan oleh kelompok pemberontak untuk menyusun rencana serangan ke Thailand Selatan". Tuduhan tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi tegang dan tuduhan tersebut mengejutkan Malaysia. Bahkan wakil perdana Perdana Menteri Malaysia yaitu Mohd Najib Tun Razak mendesak Thailand untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Najib menegaskan bahwa sama sekali tidak ada tanda yang jelas atas penggunaan Langkawi sebagai tempat latihan pemberontak Thailand Selatan. Malaysia cukup

marah atas tuduhan tersebut dan Najib Tun Razak menyatakan bahwa Malaysia bukan pangkalan bagi kelompok garis keras dan Malaysia bukanlah tempat perlindungan yang nyaman bagi teroris manapun³⁵.

Sejak pemerintah Thailand menerapkan kebijakan status darurat militer di Thailand Selatan, banyak penduduk Thailand Selatan yang melarikan diri ke Malaysia menyebrangi perbatasan kedua negara. Hal ini membuat pemerintah Thailand mendapat banyak kritikan atas kebijakan tersebut namun Thaksin Shinawatra tetap pada pendiriannya dan melarang negara mana pun untuk ikut terlibat dalam konflik Thailand Selatan. Dimana Thaksin Shinawatra menyatakan bahwa masalah di Thailand Selatan merupakan masalah internal Thailand.

Pada tahun 2005 Perdana Menteri Thaksin Shinawatra menuding Malaysia menyembunyikan separatis Thailand Selatan, ketika terjadi gelombang arus masyarakat Thailand Selatan yang melarikan diri ke Malaysia menyebrangi perbatasan kedua negara. Namun hal itu dibantah oleh Malaysia. Ketegangan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Thailand mencapai puncaknya pada tanggal 30 Agustus 2005 ketika sebanyak 131 penduduk Muslim Thailand selatan menyebrangi perbatasan antara Thailand dan Malaysia, mereka memasuki wilayah negara bagian Kelantan, Malaysia.

³⁵Banjir Darah Muslim di Pattani. Jurnal Forum Keadilan: No. 2, 09 Mei 2004. Hal. 50

Semenjak diberlakukannya status darurat militer di Thailand Selatan ternyata turut memperburuk keadaan, dimana banyak penduduk Thailand Selatan yang menyebrangi perbatasan untuk masuk ke wilayah Malaysia dan meminta suaka karena mereka tidak aman di tanahnya sendiri. Antara Malaysia dan Thailand saling beradu argumen mengenai pengungsi yang menyebrangi perbatasan. Pihak Malaysia menyatakan bahwa penduduk yang tinggal di Thailand Selatan telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Thailand. Sedangkan pihak Thailand beranggapan bahwa Malaysia telah menyembunyikan dan melindungi separatis dan menuntut Malaysia untuk memulangkan penduduk Thailand Selatan yang melarikan diri ke Malaysia tersebut.

Malaysia atas dasar kemanusiaan mau melindungi penduduk Thailand Selatan yang melarikan diri ke Malaysia tersebut, setidaknya sampai status darurat militer di Thailand Selatan di cabut oleh pemerintah Thailand. Karena penduduk yang merasa dirinya terancam pasti akan mencari tempat yang aman dan salah satu negara terdekat dari Thailand Selatan yang akan untuk dijadikan sebagai tanah pelarian yaitu Malaysia. Selain itu Malaysia mendapat dukungan internasional untuk tetap memberikan perlindungan bagi penduduk yang melarikan

diri ke Malaysia. Akibat peristiwa ini, membuat kedua negara yang bertetangga tersebut saling kecam antara satu dengan yang lain³⁶.

Malaysia prihatin dengan cara pemerintah Thailand menumpas pemberontak di Thailand Selatan dengan cara kekerasan. Kuala Lumpur khawatir, cara Bangkok tersebut menyebabkan ketidakstabilan di wilayah Malaysia Utara yang berbatasan langsung dengan daratan Thailand selatan. Di lain pihak, Thailand beranggapan bahwa Kuala Lumpur harus lebih ketat menjaga perbatasannya. Sebab, kelompok militan Thailand Selatan selalu melarikan diri ke wilayah Malaysia ketika diburu pihak berwajib Thailand.

Abdul Razak Baginda, kepala Pusat Riset Strategis Malaysia mengatakan bahwa "Hubungan diplomatik mereka terancam memburuk, kecuali jika para pemimpin kedua negara segera mengatasinya,". Thaksin Shinawatra dan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi semula dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur pada bulan Agustus tahun 2005. Namun Thaksin Shinawatra membatalkan lawatannya ke Kuala Lumpur. Thaksin hanya mengirim wakilnya. Hal ini disebabkan karena Thaksin tidak suka dengan dukungan Malaysia terhadap para tersangka militan yang melarikan diri ke Malaysia. Abdul Razak mengatakan bahwa "Saat ini, Thaksin harus memanfaatkan peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Malaysia, apa

³⁶Suaramerdeka.com. 2005. *Malaysia-Thailand Saling Kecam*.
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/19/int03.htm>, diakses pada tanggal 23 Desember 2015 pukul 17.45 WIB.

punalasannya,".Masalah hubungan kedua negara itu telah menjadi sorotan politik di dalam negeri Thailand. Menurut Abdul Razak, hal itu bisa menyulitkan langkah diplomasi kedua negara³⁷.

Sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2006 hubungan diplomatik antara Thailand dan Malaysia mengalami gangguan dan ketegangan yang cukup signifikan. Pihak Thailand kerap mengulangi tuduhan kepada Malaysia bahwa kelompok separatis Thailand Selatan sedang dikirim ke kamp-kamp pelatihan di negara bagian Kelantan di wilayah utara Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik Thailand Selatan. Pemerintah Thailand juga menuding bahwa bom-bom yang dirakit oleh kelompok separatis dibuat di Malaysia untuk di selundupkan ke Thailand Selatan. Selain itu pemerintah Thailand juga menuduh bahwa kelompok separatis sedang dilatih di wilayah Hutan Kelantan yang berbatasan dengan wilayah konflik Thailand Selatan. Hal ini membuat Malaysia tidak terima dan semakin memperkeruh hubungan kedua negara.

Kecaman demi kecaman terus terjadi antara dua negara yang secara geografis bertetangga ini. Pihak Malaysia dan Thailand masing-masing masih tetap teguh dengan pendiriannya. Akibatnya hubungan kedua negara yang selama ini baik dan berjalan dengan lancar yang memberikan banyak manfaat dan kesejahteraan bagi kedua negara,

³⁷Suaramerdeka.com. 2005. *Malaysia-Thailand Saling Kecam*.
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/19/int03.htm>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 pukul 18.00 WIB.

malah mengalami kemerosotan dan kerugian akibat dari adanya gerakan separatisme di Thailand Selatan yang masih belum teratasi sampai detik ini.

Pada masa pemerintahan Abhisit Vejjajiva sikap konfrontasi antara pemerintah Thailand dan Malaysia mengalami perubahan. Pada tanggal 09 Juni 2009 Malaysia dan Thailand sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam menanggapi keresahan di wilayah konflik Thailand Selatan saat Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengadakan kunjungan ke Kuala Lumpur, Malaysia³⁸.

2. Dampak Dalam Bidang Keamanan

Sejak terjadinya tragedi Tak Bai pada tahun 2004 membuat keamanan Malaysia terutama di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik Thailand Selatan mulai dikhawatirkan. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 30 Agustus 2005 terdapat 131 pelarian masyarakat Muslim Thailand Selatan menyeberangi perbatasan dan masuk ke wilayah Kelantan, Malaysia untuk menghindari konflik di negaranya³⁹. Selain itu para separatis tak jarang memasuki wilayah Malaysia untuk menghindari pengejaran dari militer Thailand yang tentu saja hal ini bisa menimbulkan gangguan keamanan bagi Malaysia. Hal ini membuat Malaysia khawatir yang disebabkan karena kedekatan

³⁸Najibrazak.com. 2009. *Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva lawat Malaysia*. https://www.najibrazak.com/en/news_archive/perdana-menteri-thailand-abhisit-vejjajiva-lawat-malaysia/. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 18.46 WIB.

³⁹Ibid.

geografis antar kedua negara serta kekhawatiran akan perluasan konflik
Pattani ke Malaysia.